

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bekas peradaban terbesar didunia, Turki memiliki beragam keunikan tersendiri dimana negara tersebut dikatakan sebagai negara lintas benua karena terbentang dari semenanjung Anatolia, menyeberang selat Borporus hingga mencapai Eropa Tenggara sehingga disebut sebagai negeri yang menghubungkan kebudayaan timur di Asia dan kebudayaan barat di Eropa (Rofii, 2019).

Jika di telaah dari segi historis, wilayah yang kita kenal sebagai negara Turki saat ini merupakan pusat dari imperium Utsmaniyah yang pada puncak kejayaannya dijuluki sebagai negara adidaya karena berhasil menaklukkan otoritas pusat dari Gereja Ortodoks yakni kota Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad al-Fatih kemudian pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni yang berhasil menyatukan wilayah Utsmaniyah atau yang dikenal oleh sejarawan barat sebagai Ottoman hingga meliputi daerah Hijaz, Afrika utara, negeri-negeri Syam, bahkan sampai ke Krimea dan daerah Balkan (Kurniawan and Hadi, 2022).

Akhir perang dunia pertama (PD 1) yang diikuti dengan kejatuhan Kekhilafaan Utsmaniyyah ditandai dengan pembentukan Republik Turki melalui revolusi yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Attaturk menandai berakhirnya pengaruh identitas Islam di bekas kekuasaan Kekhilafaan

tersebut diganti dengan norma & identitas baru yang dalam hal ini merujuk pada paham nasionalisme-sekularisme atau yang lebih dikenal dengan sebutan kemalisme yang ditanamkan dengan kuat dengan militer Turki sebagai penjaganya (Hadoko, 2016).

Adanya dinamika pergantian kekuasaan, identitas, pengaruh, ideologi dan politik yang silih berganti menjadikan bangsa dan negara Turki saat ini telah ditempa sedemikian rupa hingga pada akhirnya sampai saat ini tetap kokoh menjadi negara yang berdaulat diantara negara-negara Timur Tengah yang lain, keunikan-keunikan tersebut menjadi nilai tambah tersendiri bagi Turki untuk bisa berdiplomasi dengan baik dengan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya.

Dalam revolusi Turki, Mustafa Kemal Attaturk berkontribusi besar dalam menciptakan identitas nasional baru yang menerapkan ideologi nasionalis sekaligus reformasi politik modern dengan mengkonstruksi rezim kesultanan sebelumnya dan membangun bangsa baru yang akan melahirkan Republik Turki. Identitas nasional baru yang dimaksud adalah hasil dari ideologi kemalisme yang ia perkenalkan dengan bantuan partainya yaitu Partai Rakyat Republik (CHP) beliau mengadopsi 6 prinsip dasar yang kemudian dinamakan *Six Arrows* yang terdiri atas Republikanisme, Nasionalisme, Populisme, *Etatism*, Sekularisme dan Revolusi/Reformisme (Muhammad *et al.*, 2020).

Kebijakan luar negeri Turki sebelum Erdogan berkuasa masih sangat dipengaruhi oleh identitas dan ideologi kemalisme yang

ditanamkan cukup kuat sehingga pendahulu-pendahulu Erdogan yang silih berganti berusaha melepaskan jaringan konservatisme Islam yang telah lama kuat di Turki sebelum revolusi terjadi dengan cara menjadikan negara Turki menjadi bagian dari Eropa dengan cara melakukan diplomasi dan negosiasi dengan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa agar bisa menjadikan Turki salah satu kandidat resmi yang akan diterima di UE.

Hal tersebut menjadikan Turki secara identitas merasa menjadi bagian dari Uni Eropa dan hal tersebut akhirnya menuntun Turki mengeluarkan serangkaian kebijakan berdasarkan kepentingan yang didasari oleh “identitas baru” tersebut, yakni Identitas kolektif bersama dengan negara-negara Eropa. Hal tersebut terbukti dengan peresmian Turki sebagai calon kandidat resmi UE tepatnya pada KTT Uni Eropa tanggal 10 Desember 1999 yang digelar di kota Helsinki, Finlandia (Rofii, 2017), Dalam Jurnal *Interdependence Hubungan Internasional* tersebut juga disebutkan selain memenuhi harapan parlemen Eropa kepada Turki untuk segera melakukan upaya dalam negeri dalam hal ini reformasi undang-undang agar bisa diterima di UE, Turki juga melakukan serangkaian upaya dari mitra partner yang dinilai bisa membantu percepatan peresmian Turki sebagai anggota UE. Langkah-langkah tersebut diantaranya :

1. Melobi mitra dagang Turki seperti Prancis dan Jerman
2. Memanfaatkan kedekatan Turki dengan US dalam NATO

3. Melakukan penggalangan dukungan dengan “kekuatan-kekuatan baru dunia” seperti Rusia
4. Memakai diplomasi kebudayaan
5. Melibatkan para pelaku bisnis Turki dalam hal mengembangkan *branding image* sebuah produk komersial.

Namun dibawah kekuasaan Erdogan dengan partai AKP-nya, kebijakan luar negeri Turki cenderung bergeser dari identitas dan nilai-nilai kemalisme yang dulunya begitu kuat di Turki, saat ini Identitas negara Turki secara signifkn mulai mengikuti “manifesto” serta pemikiran-pemikiran Erdogan yang berimbas pada pergeseran kebijakan luar negeri Turki yang selama ini terlalu condong ke Uni Eropa. Melalui Erdogan dan partai AKP-nya Turki mulai bertransformasi menjadi negara yang independen dan kian “unjuk taring” di kawasan Timur tengah dan hal tersebut bukan karena manifesto Erdogan belaka, melainkan karena dukungan sebagian besar masyarakat Turki yang menilai kebijakan Erdogan membawa identitas islami yang lebih damai (Junaidi, 2016).

Sejak berkuasanya partai AKP hingga perubahan pucuk kepemimpinan Presiden Turki tahun 2014 yang ditandai dengan naiknya Recep Tayyip Erdogan dari partai AKP sebagai Presiden Turki seolah memberi sinyal bahwa identitas sekularisme di turki perlahan akan terkikis dan kembali digantikan oleh identitas Islam moderat yang dibawah oleh AKP yang kini menguasai hampir seluruh negara Turki secara politik,

realitas politik tersebut seolah kembali mengulang pengaruh Islam yang memang telah menjadi identitas bagi bangsa Turki selama berabad-abad.

Dibawah pengaruh Presiden erdogan, Turki secara bertahap terus menggulirkan kebijakan domestik serta kebijakan luar negeri yang belum pernah dikeluarkan pemimpin-pemimpin Turki sebelumnya, dalam ranah domestik, pengikisan paham kemalisme sangat terasa dengan merebaknya kebijakan politik islam sepereti pencabutan larangan hijab, pembatasan minuman keras hingga rekonstruksi ulang status bangunan sejarah “Hagia Shopia” menjadi masjid yang hanya terjadi di era Erdogan walaupun mendapat kecaman dari berbagai kalangan seperti para kelompok sekuler, Yunani, Amerika Serikat, bahkan Uni Eropa dan UNESCO. Namun respon positif justru didapat dari mayoritas muslim di negara Turki hingga dinegara-negara tetangga Turki bahkan direspon secara positif oleh umat muslim Indonesia (Nursya’ban, 2021).

Beberapa insiden kontroversial Presiden Turki tersebut sungguh bertentangan dengan semangat sekularisme dan ajaran kemalisme yang telah ditanamkan kuat-kuat oleh *Founding Father* mereka. Namun respon masyarakat seolah mendukung yang dibuktikan dengan gagalnya percobaan kudeta militer terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan oleh militer Turki yang digagalkan oleh rakyat Turki sendiri (Armandhanu, 2016).

Transformasi yang terjadi di Turki dari negara tradisional berlandaskan konservatisme Islam menjadi menjadi sebuah negara modern yang berlandaskan sekularisme atau yang kita kenal sebagai ideologi kemalisme mengilustrasikan bahwa perubahan yang terjadi di sebuah negara baik dari bentuk negara, ideologi yang dianut, hingga moral nasional yang melekat pada warga negaranya semata-mata tidak hanya dipengaruhi oleh elemen-elemen material seperti ekonomi namun lebih banyak dipengaruhi oleh beragam faktor non-material seperti ideologi, identitas nasional, agama dll yang dalam hal ini merupakan hasil dari konstruksi sosial (Mustofa, 2016).

Konstruksi sosial yang dimaksud merupakan salah satu asas dalam grand teori HI yaitu teori konstruktivisme dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, dimana premis awal yang menjadi patokan teori tersebut terletak pada asumsi bahwa realitas hubungan internasional tidak bersifat statis karena di konstruksi secara sosial melalui interaksi para aktor. Hal ini menjadikan elemen non-material sangat berpengaruh pada sendi-sendi yang membentuk negara itu sendiri, sama halnya yang terjadi di Turki saat ini dimana paham nasionalisme-sekularisme atau yang lebih dikenal dengan kemalisme perlahan mulai memudar dan terkikis oleh identitas keagamaan yang di konstruksi oleh Presiden Erdogan yang serta mayoritas pejabat yang berasal dari partai AKP pimpinan Erdogan yang menduduki mayoritas pemerintahan ditambah dengan kecenderungan pihak militer

yang sejatinya melindungi paham kemalisme justru berbalik memihak pemerintahandan presiden yang sah (Domo *et al.*, 2018).

Oleh karena itu penelitian ini akan membahas perubahan kebijakan luar negeri di era Presiden Erdogan yang akan dianalisis menggunakan kacamata teori Konstruktivisme dan analisis idiosinkratik yang menitik beratkan pada aspek non-material dan peran pemimpin negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada fenomena perubahan kebijakan luar negeri Turki dibawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan sejak menjabat dari tahun 2014 – 2025. Turki yang dimaksud merupakan negara Turkiye, namun dalam penelitian ini penyebutan negara tersebut masih menggunakan ejaan lama dikarenakan ejaan baru nama negara tersebut masih kurang begitu populer dikalangan akademisi maupun masyarakat awam. Oleh karena itu berdasarkan batasan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merangkum 2 pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki dibawah Presiden Recep Tayyip Erdogan?
2. Bagaimana implikasi perubahan kebijakan luar negeri Turki dengan pendekatan konstruktivisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki dibawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi perubahan kebijakan luar negeri Turki melalui pendekatan konstruktivisme dan analisis idiosinkratik.

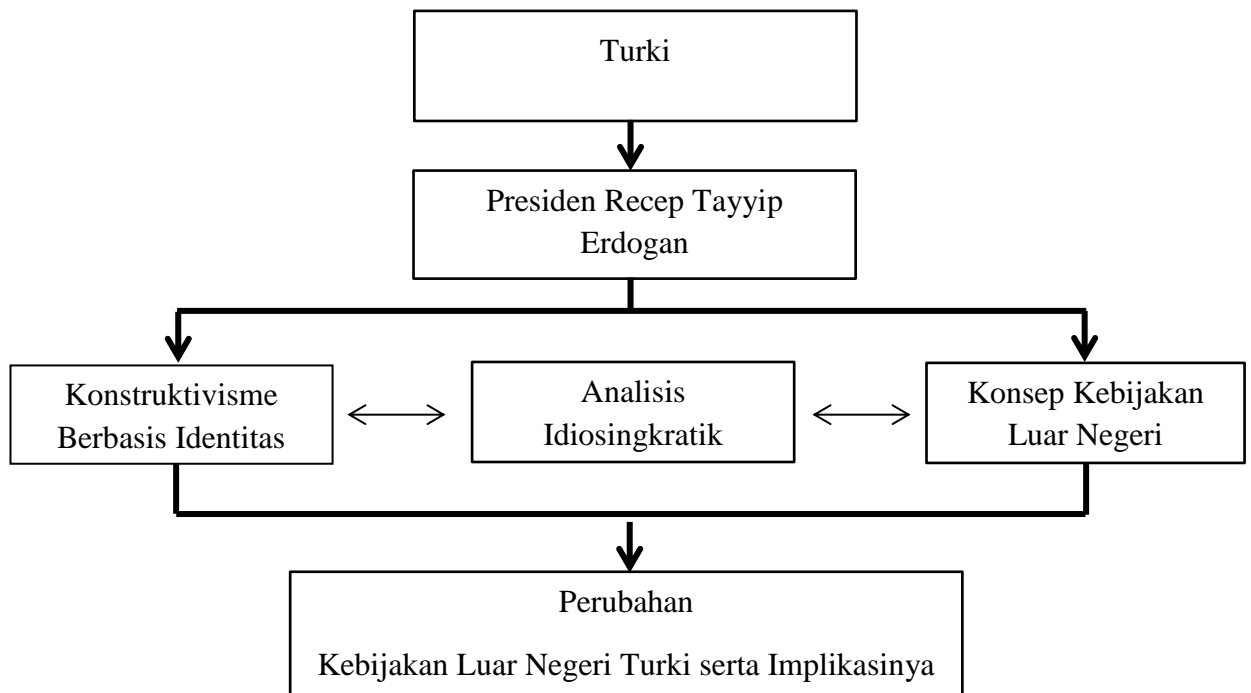
2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman dinamika HI terutama dalam konteks kebijakan luar negeri Turki, selain itu penelitian ini memberikan penulis pengalaman dalam menerapkan teori hubungan internasional terutama konstruktivisme untuk menjelaskan fenomena perubahan kebijakan luar negeri Turki secara kritis dan sistematis
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi serta referensi dalam kajian hubungan internasional khususnya studi kawasan Timur Tengah terkait analisis konstruktivisme dan idiosinkratik dalam perubahan kebijakan luar negeri Turki di era Erdogan.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan banyak membahas tentang perubahan-perubahan kebijakan luar negeri Turki terutama pada saat Recep Tayyip Erdogan menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014. Kebijakan-kebijakan Erdogan dengan partai AKP-nya sukses membuat transformasi yang cukup signifikan bagi Turki baik dari aspek sosial, politik, bahkan ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan domestik hingga kebijakan luar negeri yang membuat politik luar negeri Turki semakin “berubah haluan” sejak Erdogan berkuasa.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori konstruktivisme yakni terutama konstruktivisme konvensional berbasis identitas sebagai faktor analisa utama dimana semenjak Erdogan berkuasa kebijakan-kebijakan yang diterapkan cukup berbeda dari yang seharusnya dilakukan oleh para pendahulunya. Selain itu analisis idiosinkratik dan analisis individu dalam konsep kebijakan luar negeri sebagai faktor analisa pendukung juga akan digunakan secara bersama-sama untuk mengelaborasi data-data yang ada dan kemudiakan akan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, dan tergambar melalui kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

1. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan pemikiran idealis yang menggambarkan bahwa struktur material dalam tatanan sosial terbentuk secara intersubjektif di tengah masyarakat. Menurut Alexander Wendt, teori konstruktivisme dianggap sebagai teori struktural yang mengklaim beberapa hal yakni, negara sebagai unit analisis utama dalam teori dan politik internasional, kepentingan dan identitas suatu negara dibangun dan dibentuk berdasarkan struktur sosialnya yang artinya tidak *given* namun dinamis berdasarkan konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi para aktor atau sistem, dan yang terakhir struktur utama dalam sistem internasional cenderung bersifat intersubjektif dari pada material. Oleh

karena itu, dalam teori ini komunikasi ditempatkan sebagai kunci utama dan memiliki peran penting dalam menggerus arah aktivitas hubungan internasional (Bakry, 2017).

Salah satu pendapat pada teori ini ialah elite-elite yang berpengaruh pada suatu negara dipengaruhi dan berada didalam suatu norma, ideologi bahkan kebudayaan yang lazim disebut sebagai *strategic cultures*. Konsep inilah yang mempengaruhi elite tersebut dalam membentuk apa yang kita sebut sebagai politik luar negeri. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor non-politik seperti pengalaman historis dan tradisi yang selama justru banyak ini diabaikan oleh para pemikir HI khususnya pemikir realis dan liberal, justru konsep *strategic cultures* yang membedakan para pemangku kebijakan diberbagai negara dalam merusmuskan politik luar negeri mereka walaupun negara-negara tersebut masih berada pada situasi global yang persis sama.

Dalam pandangan kaum konstruktivis, sistem internasional tidak bersifat statis atau menetap, melainkan bersifat dinamis dan dapat diubah oleh para aktor atau pemangku kebijakan dalam hal ini ialah negara. Begitupun halnya dengan dengan negara sebagai unit analisa dalam sistem internasional dimana aktor-aktor negara akan merespon sistem internasional yang ada berdasarkan faktor-faktor yang telah dikonstruksi secara sosial seperti identitas, norma-norma yang dianut. Negara juga akan

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan hasil dari konstruksi sosial yang telah mereka bentuk sendiri.

Kepentingan nasional atau *national interest* suatu negara juga mendapatkan perhatian lebih dari kaum konstruktivis namun dalam definisi yang cenderung berbeda, mereka memandang aspek kepentingan sedikit berbeda dari yang dianut oleh kaum realis dimana konstruktivisme memandang bahwa aspek non-material sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri misalnya melalui 2 konsep dasar yaitu identitas dan norma (Dugis, 2016). Kepentingan nasional adalah produk dari identitas dan bukan persoalan material semata melainkan memiliki penekanan yang lebih pada konstruksi kepentingan karena menurut para kaum konstruktivis sendiri identitas adalah representasi pemahaman aktor tentang siapa diri mereka yang pada akhirnya akan menuntun mereka pada kepentingan atau *interest* dan tindakan atau *actions* yang akan dilakukan oleh negara bersangkutan (Mukti, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, skripsi ini akan dianalisis menggunakan kacamata konstruktivisme dengan mengelaborasi faktor-faktor yang melatarbelakangi transformasi politik luar negeri yang terjadi di Turki pada saat Erdogan berkuasa, kepentingan-kepentingan Erdogan dan bagaimana Turki berusaha mengkonstruksi kepentingan mereka dinegara-negara sekitarnya berdasarkan elemen-elemen yang dikaji dalam perspektif Konstruktivisme yakni identitas para aktor, norma dll.

2. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Secara umum kebijakan luar negeri adalah segala tindakan suatu negara terhadap aktor negara maupun aktor non-negara dalam politik internasional, dengan didasarkan pada tujuan tertentu dan umumnya dipengaruhi oleh kepentingan nasional atau *national interest*. Menurut Joshua Goldstein mengatakan bahwa definisi kebijakan luar negeri adalah keputusan yang menyangkut strategi oleh pemerintah suatu negara dalam menentukan aksi mereka di lingkup internasional. Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri yaitu upaya yang dilakukan oleh suatu negara yang mewakili keseluruhan sikap dan tindakannya untuk mengatasi dan memperoleh dampak dari lingkungan eksternalnya.

Kebijakan luar negeri terdiri dari beberapa komponen diantaranya seperti pandangan, sikap, keputusan atau pun tindakan yang dalam hal ini tindakan sangat dipengaruhi oleh adanya power dalam suatu negara. Dalam memakai konsep kebijakan luar negeri sebagai faktor analisa, umumnya dibagi menjadi menjadi 3 level analisis yang akan membantu dari mana kebijakan tersebut dikeluarkan. Ketiga level analisis tersebut diantaranya kebijakan luar negeri yang selanjutnya disebut KLN yang dianalisis dari level individu (pemimpin). Kedua, KLN yang dianalisis dari level domestik negara dan yang ketiga, KLN yang dianalisis dari level sistem.

Konsep kebijakan luar negeri ini cukup relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian terutama pada level analisis yang pertama yaitu analisis kebijakan luar negeri berdasarkan aktor individu (pemimpin negara), dimana konsep ini membantu dalam melihat bagaimana Erdogan merangkum serta merumuskan kebijakan luar negerinya sejalan dengan identitas yang melekat pada dirinya dan negara Turki secara keseluruhan berdasarkan identitas dan norma yang melekat pada negara tersebut.

3. Analisis Idiosinkratik dalam Hubungan Internasional

Dalam studi hubungan internasional, salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah pendekatan **idiosinkratik**. Pendekatan ini menekankan pentingnya karakteristik personal dan psikologis seorang pemimpin dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Berbeda dari pendekatan struktural seperti realisme atau liberalisme yang lebih menyoroti sistem internasional dan kepentingan negara secara kolektif, pendekatan ini justru memusatkan analisis pada individu, khususnya pemimpin negara, yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan luar negeri negaranya (Navaro Parkin, 2023).

Secara etimologis, istilah *idiosinkratik* mengacu pada sifat-sifat khas atau unik yang dimiliki seseorang, termasuk cara pandang terhadap dunia, sistem nilai, dan preferensi politik. Dalam konteks hubungan internasional, sifat-sifat ini diwujudkan dalam bentuk persepsi dan

interpretasi pemimpin terhadap lingkungan internasional, serta cara mereka bertindak merespons situasi global (Shalsabila, 2023). Kenneth Waltz (1959), dalam kerangka *three levels of analysis*, menyebut pendekatan ini sebagai *First Image*, yaitu analisis terhadap individu sebagai penyebab utama konflik atau perdamaian dalam politik internasional.

Dalam praktiknya, pendekatan ini menggunakan berbagai metode analisis. Salah satu metode paling dikenal adalah *psychobiography*, yakni kajian terhadap latar belakang pribadi dan pengalaman hidup pemimpin untuk memahami motif di balik kebijakan mereka. Selain itu, *content analysis* juga digunakan untuk menelaah pidato dan pernyataan publik. Margaret Hermann (2003) mengembangkan metode *Leadership Trait Analysis (LTA)* untuk mengukur tujuh dimensi kepribadian pemimpin, seperti tingkat kepercayaan diri, kebutuhan akan kekuasaan, dan toleransi terhadap perbedaan.

Sementara itu, pendekatan *Operational Code Analysis* yang dikembangkan oleh Walker, Schafer, dan Young (2003) digunakan untuk memahami keyakinan mendasar pemimpin, baik mengenai bagaimana dunia bekerja maupun cara terbaik untuk bertindak dalam dunia politik.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi karakter idiosinkratik seorang pemimpin meliputi aspek psikologis seperti emosi, bias kognitif, dan cara berpikir dalam menghadapi tekanan. Selain itu, kepribadian dan

gaya kepemimpinan juga memainkan peran penting, terutama dalam konteks sistem politik otoriter atau dalam situasi krisis yang menuntut keputusan cepat (Hudson, 2005). Latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup juga memiliki kontribusi besar terhadap cara pemimpin membentuk visi dan arah kebijakan luar negerinya.

Kekuatan utama pendekatan idiosinkratik terletak pada kemampuannya menjelaskan dinamika pengambilan keputusan luar negeri secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini sangat relevan dalam kondisi ketidakpastian, krisis, atau ketika sistem institusional lemah dan peran pemimpin menjadi dominan. Dengan demikian, pendekatan idiosinkratik tetap menjadi alat penting dalam menganalisis hubungan internasional. Dengan mengedepankan aspek-aspek personal dalam pengambilan keputusan, pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih kaya dan manusiawi terhadap dinamika global yang kompleks.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian kualitatif, dikutip dari karya Bagong Suyanto & Sutinah penelitian kualitatif memiliki tumpuan pada tradisi, aliran ataupun orientasi teori yang keseluruhan aspek tersebut menekankan pada pengembangan dan penyusunan teori yang ditandai oleh strategi induktif-empiris (Bagong

Suyanto, 2005). Penelitian ini menggunakan landasan studi literatur, penelitian kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada gejala, simbol hingga makna suatu fenomena tertentu yang kemudian disajikan secara naratif. Melalui metode penelitian ini penulis akan menjelaskan secara naratif dampak transformasi arah politik luar negeri Turki terhadap dinamika politik yang terjadi di Suriah sesuai dengan gejala dan fakta-fakta yang ada dilapangan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel online video wawancara atau *report* dan hasil survei dari sumber yang terpercaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah yaitu menggunakan *library research* atau studi pustaka, metode ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang diperoleh dari media cetak seperti artikel online, jurnal, buku dll. Penggunaan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka akan membuat hubungan antara masalah-masalah yang ingin dijawab dan teori-teori akan lebih relevan.

4. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deduktif. Penulis terlebih dahulu akan menjabarkan berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian secara umum lalu kemudian akan menjelaskan secara rinci tentang masalah yang sedang diteliti sampai pada tahap akhir dengan dilakukannya kesimpulan hasil penelitian dari data-data penelitian yang telah diperoleh serta sudah dianalisis oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstruktivisme

Di tahun 80-an fase baru ilmu hubungan internasional dimulai yang ditandai dengan adanya perdebatan besar ketiga atau *the Third Great Debate* yang mana di fase tersebut terjadi pertentangan berbagai paradigma yang berkembang dalam studi HI. Perdebatan tersebut memunculkan 2 kutub yang berpengaruh yakni kubu ‘rasionalis-positivis’ dalam hal ini realisme, liberalisme, marxisme dan lain-lain, sedangkan lawan dari kubu tersebut adalah penganut “reflektivis-pospositivis” yakni penganut teori dan ide-ide postmodern, postrukturais, feminis, studi perdamaian dan teori-teori terkait. Di akhir tahun 80-an muncul fase baru dimana lahirnya konstruktivisme yang menyatakan sebagai “penengah” bagi kedua kubu tersebut (El Bilad, 2011). Dalam konstruktivisme, konsep non-material sendiri lebih berpengaruh dimana salah satunya adalah ide. Perdebatan ontologis dan epistemologis sendiri tentang ide menurut Steve Woolgar mengerucut pada 3 jenis pendekatan yaitu : *the reflective*, *the constitutivr*, dan *the mediative* (El Bilad, 2011). Pendekatan “*the reflective*” melihat material/realitas dan ide adalah sesuatu yang benar-benar berbeda satu sama lain. Material/realitas adalah suatu hal yang bisa kita lihat melalui panca indera walaupun ada yang tak terlihat namun eksistensi mereka tetap bisa kita rasakan, sedangkan ide adalah suatu hal yang ada dalam pikiran kita, dan ide ditentukan oleh struktur sosial yang

bersifat dinamis. Pendekatan ini kebanyakan dianut oleh para pengikut aliran “neo-neo” teori klasik seperti aliran norealis dan neoliberal. Pendekatan kedua yakni “*the constitutive*” memiliki pemahaman bahwa realitas tidak lain adalah ide atau memiliki relasi timbal balik. Dalam hal ini hal-hal yang selama ini di yakini sebagai suatu hal yang “dapat di indera” seperti pada pendekatan pertama merupakan hasil dari fantasi ide itu sendiri. pendekatan ini dianut oleh pengikut aliran poststrukturalis-posmodernis.

Adanya kedua pendekatan dan aliran yang sangat berseberangan tersebutlah memicu fenomena *the Third Great Debate* pada tahun 1980-an seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu muncullah penengah dari kedua kubu tersebut yakni para penganut pendekatan ketiga yakni “*the mediative*”. Penganut pendekatan ini lebih memilih posisi moderat dalam melihat relasi antara realitas/material dan ide. Dari sinilah kemudian lahir konstruktivisme dalam Ilmu Hubungan Internasional dimana pendekatan ini melihat realitas/material sebagai “produk sosial” yang mana keberadaan realitas/material tidak dapat diindera sebelum disematkan makna tertentu.

Inti dari pendekatan terakhir yang dianut oleh para pemikir konstruktivisme adalah mereka mengakui eksistensi keduanya yakni realitas/material dan Ide karena keduanya memiliki kedudukan ontologis yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ide hanya berupa pemikiran dan tidak bermakna apa-apa jika tidak wujudkan kedalam bentuk

realitas/material. Dan begitupun sebaliknya realitas/material juga tidak bermakna apa-apa jika tidak diikuti dengan ide atau pemaknaan. Dan pada akhirnya *third debate* dalam ilmu hubungan internasional tersebut cukup memberikan pergeseran tema dalam dalam bidang studi HI dari “bagaimana menciptakan perdamaian dunia” menjadi “atas dasar apa negara bertindak? Faktor material/realitas atau ide?”.

Pada dasarnya teori konstruktivisme bukan merupakan teori yang murni berasal dari disiplin ilmu hubungan internasional, melainkan teori sosiologi yang implementasinya dibawa kedalam ranah hubungan internasional. Hal ini kembali lagi berangkat pada *third debate* dalam disiplin HI dimana kecenderungan kaum *positivism* untuk mendukung cara kerja ilmu alam dalam melihat fenomena HI begitupun dengan kaum postpositivisme yang menolak hal tersebut dan menyatakan hal sebaliknya. Maka dari itu beberapa ilmuwan HI kemudian mencari kerangka berfikir yang lebih pas untuk dapat digunakan dalam memahami fenomena hubungan internasional yang pada akhirnya merujuk pada 2 teori dalam ilmu sosial yang akan menjadi cikal bakal akar pemikiran konstruktivisme yaitu teori interaksionisme simbolik & teori strukturasi. Oleh karena itulah pemahaman mengenai konstruktivisme baik akar pemikiran, asumsi dasar dll sangat berbeda dengan teori-teori lain yang lebih dahulu mendominasi HI yakni realism, liberalisme dan marxisme.

Hal ini karena ketiga teori tersebut menurunkan akar pemikiran dari teori politik sedangkan konstruktivisme sendiri berangkat dari teori

sosial dan menurunkan premis-premis dasar dari disiplin keimuan tersebut. George Herbert Mead dalam bukunya “*Mind, Self, and Society*”, Beliau-lah yang mencetuskan teori Interaksionisme Simbolik yang merupakan salah satu teori akar pemikiran dari konstruktivisme. Dalam bukunya ia mengatakan bahwa “individu merupakan produk dari struktur sosial”. Dengan kata lain struktur sosial-lah yang menentukan bagaimana individu tersebut merespon dan bertindak. Dan keberadaan individu tidak bisa terlepas dari adanya struktur sosial.

Kemudian dari pemikiran Mead tersebut akhirnya tercipta 3 premis utama dari teori ini yang dirangkum oleh Herbert Blumer diantaranya: Individu bertindak pada suatu realitas tergantung pemaknaan yang melekat padanya, Pemaknaan akan realitas itu tercipta karena adanya interaksi sosial, dan yang terakhir pemaknaan tersebut bersifat dinamis atau berubah-ubah tergantung interpretasi individu tersebut. Sedangkan teori Strukturasi oleh Anthony Giddens yang juga menyumbang banyak pada perkembangan Konstruktivisme berangkat dari asumsi bahwa agen dan struktur saling membentuk dan mempengaruhi satu sama lain atau dikenal dengan istilah *mutually constituted*, dan asumsi tersebut berkembang pada dekade 1980-an lewat karya yang berjudul *The Constitution of Society : Outline of the Theory of Strukturation*.

Berbicara mengenai asumsi dasar dalam konstruktivisme, maka kita akan banyak berbicara mengenai hakikat aktor, kepentingan nasional dan struktur internasional karena ketiga komponen tersebut adalah aspek

yang secara umum telah menjadi topik utama dalam melihat fenomena yang terjadi dalam lingkup internasional. Berangkat dari hakikat aktor, maka konstruktivisme memandang bahwa aktor internasional bukan hanya negara, walaupun ada sebagian kaum konstruktivisme yang cenderung *state sentris* namun secara garis besar konstruktivisme juga menaruh perhatian besar pada aktor non-negara.

Aktor non-negara tersebut pun terbagi lagi menjadi 2 macam, yang pertama adalah aktor non-negara yang disebut *Transnational Advocacy Network* (TAN) atau jaringan advokasi transnasional dimana aktor-aktor yang dikategorikan dengan nama “TAN” tersebut adalah lembaga-lembaga yang aktif mengangkat isu-isu sentral dan umum dibahas dalam lingkup hubungan internasional seperti isu HAM, lingkungan, demokrasi, hukum, kesehatan, gender dll. sedangkan kategori kedua adalah aktor non-negara yang disebut *Epistemic Community* atau disebut komunitas epistemic, aktor ini beranggotakan para ilmuwan dan agendanya cenderung menyebarluaskan gagasan yang bersifat ilmiah.

Aspek kedua adalah hakikat kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah salah satu elemen penting dalam hubungan internasional yang mana kepentingan nasional merupakan representasi dari politik suatu negara yang mengarahkan suatu negara bertindak dan menjalin hubungan dengan negara lain atau *non-state* lainnya. Konstruktivisme berangkat dari premis “Hubungan internasional adalah suatu realitas yang terkonstruksi secara sosial” maka dari itu hakikat kepentingan nasional menurut

pandangan konstruktivisme adalah representasi politik suatu negara yang terjadi karena adanya interaksi sosial yang terjadi diantara aktor itu sendiri.

Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa kepentingan nasional yang dimaksud tidak bersifat “given” ataupun suatu hal yang bersifat statis, melainkan dapat berubah-ubah antara aktor satu dengan lainnya dan berubah sesuai dengan konteks sosial yang dimainkan para aktor. Konteks sosial yang dimaksud adalah bagaimana suatu aktor melihat dirinya dalam situasi internasional dan juga tindakan yang para aktor lakukan satu sama lain. Analogi sederhananya adalah politik atau kebijakan suatu negara terbentuk atas dasar kepentingan negara tersebut. Dan kepentingan suatu negara terbentuk dari interaksi para aktor dan bagaimana aktor mendefinisikan dirinya dalam situasi global.

Dan aspek yang terakhir berbicara tentang hakikat struktur internasional dalam pandangan konstruktivisme. Struktur internasional bagi konstruktivis terdiri dari elemen ideasional atau unsur tak kasat mata/non-material. Unsur yang dimaksud diantaranya norma, ide, identitas, moral nasional dll. Sehingga ada kecenderungan kaum konstruktivis “mengagungkan” aspek non-material berbanding terbalik dengan kaum realis yang justru sebaliknya. Namun bukan berarti kaum konstruktivis tidak memikirkan aspek material, namun aspek material dalam pandangan konstruktivis baru berharga tergantung makna ideasioanl yang disematkan para aktor terhadapnya. Sebagai suatu contoh pemaknaan kepemilikan senjata nuklir di Korea utara tentunya antara AS dan Tiongkok memiliki

pemaknaan yang cukup berbeda, hal ini sangat dipengaruhi oleh ideasional yang disematkan tiap negara terhadap aspek material tersebut.

Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pandangan konstruktivisme melihat fenomena hubungan internasional sebagai suatu hal bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah, kadangkala bersifat anarki seperti dipandangan kaum realis, bersifat kooperatif seperti pandangan kaum liberal, bahwa kadangkala bersifat eksploitatif seperti yang dimaksud oleh orang yang berpegang teguh dengan aliran marxisme. Hal tersebut dikarenakan elemen tak kasat mata atau ideasional yang cenderung berubah-ubah dan menjadi kunci yang sangat mempengaruhi hubungan antara aktor satu dengan yang lainnya.

Konstruktivisme sendiri terpecah menjadi 2 aliran besar yaitu konstruktivisme aliran moderat atau kadang disebut aliran konvensional, disebut demikian karena aliran ini banyak berbicara mengenai hubungan sebab-akibat dalam menjelaskan fenomena didalam hubungan internasional, yang kedua adalah konstruktivisme aliran kritis. Namun di penelitian ini konstruktivisme yang akan digunakan adalah konstruktivime aliran konvensional yang berbasis pada elemen identitas.

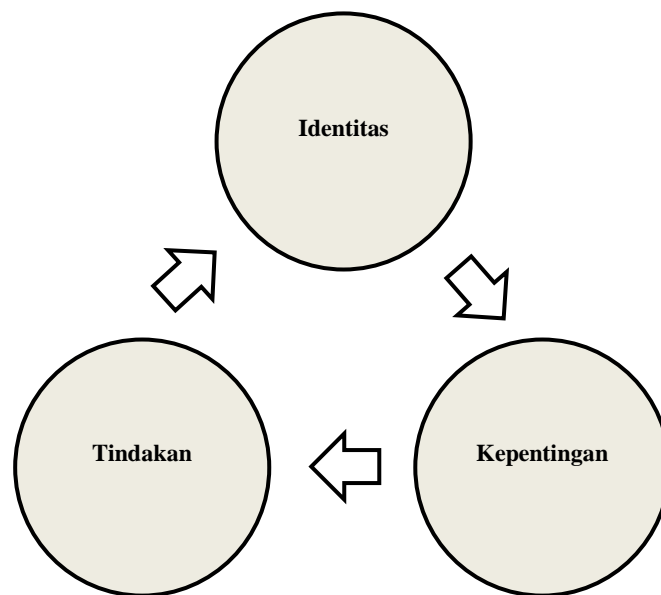
Sebenarnya konstruktivisme konvensional sendiri secara umum ada 3 varian, yakni konstruktivisme berbasis identitas, konstruktivisme berbasis norma dan yang terakhir konstruktivisme berbasis bahasa atau kadang disebut juga konstruktivisme linguistic. Namun untuk mendapatkan suatu jawaban dari penelitian yang konsisten maka dipilihlah

konstruktivisme konvensional berbasis identitas sebagai “pisau analisis” utama dalam menjawab perubahan kebijakan luar negeri Turki di era Presiden Erdogan. Walaupun di beberapa bagian juga akan sedikit menekankan pada konstruktivisme berbasis norma dan berbasis bahasa (linguistic) tetapi tidak akan mendominasi.

Konstruktivisme berbasis identitas lebih menekankan pada model “negara-sentris” dimana aliran ini mengakui eksistensi aktor lain namun aktor negaralah yang paling penting karena memerankan “identitas” yang lebih mencolok. Secara sederhana identitas yang dimaksud adalah atribut yang membedakan suatu aktor dengan aktor yang lain. Hal ini senada dengan pertanyaan “siapa saya?” dan “siapa mereka?” walaupun di beberapa kondisi keadaan tersebut bisa saja akan sangat variatif tergantung konteks sosial dimana aktor tersebut berada. Jadi faktor identitaslah yang menentukan bagaimana aktor memahami apa yang mereka inginkan atau dalam hal ini disebut juga kepentingan.

Identitas justru yang menentukan kepentingan, dan kepentingan itu sendiri yang mengarahkan bagaimana suatu aktor bertindak (kebijakan). Namun yang perlu digaris bawahi disini hubungan antara identitas, kepentingan dan tindakan tidak berbentuk linear melainkan berbentuk siklus, yang mana tindakan yang dilakukan oleh aktor berdasarkan identitas dan kepentingan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga memberikan implikasi secara konstan ke identitas aktor itu sendiri. sebagai contoh jika suatu aktor mengeluarkan tindakan/kebijakan konsisten dengan

identitasnya yang melekat, maka identitas tersebut akan semakin kuat. Namun sebaliknya jika aktor justru mengeluarkan kebijakan yang menyimpang dari identitasnya maka besar kemungkinan identitas tersebut akan memudar dan bisa mengarah pada terbentuknya identitas baru.



Gambar 1.2 Analogi Hubungan Identitas, Kepentingan, & Tindakan

Seperti inilah analogi hubungan antara identitas, kepentingan dan tindakan dalam pandangan konstruktivisme berbasis identitas. Hal tersebut sejalan dengan premis awal pemikiran konstruktivisme yang berangkat dari pendapat bahwa realitas internasional tidak bersifat *given* dan permanen, melainkan dinamis karena dikonstruksi secara sosial.

Dalam ilmu sosial, identitas umumnya terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah identitas personal, identitas ini berdsifat statis dan tidak akan berubah karena merupakan sifat bawaan. Contoh yang termasuk

identitas personal adalah ras, etnis, jenis kelamin dan lain-lain. Yang kedua adalah identitas sosial, identitas ini cenderung lebih fleksibel dan bisa berubah-ubah karena tercipta melalui hasil interaksi para aktor atau “terkonstruksi” secara sosial, contoh yang termasuk identitas sosial adalah peran aktor dalam situasi sosial.

Ilmu hubungan internasional khususnya teori konstruktivisme mengadopsi kedua jenis identitas tersebut sebagai dasar acuan berbagai jenis identitas yang nantinya dapat dipakai untuk mengklasifikasikan jenis aktor, khususnya aktor negara yang kemudian dari identitas tersebut berimbas pada tindakan atau kebijakan. Wendt kemudian membagi jenis identitas menjadi 4 yakni, Identitas korporat, identitas tipe, identitas peran dan identitas kolektif. Identitas korporat merupakan identitas yang melekat suatu negara dan besar kemungkinan tidak akan berubah. Karena identitas tersebut bisa melekat tanpa persetujuan atau interaksi dengan aktor lain, contohnya identitas negara Turki berdasarkan letak geografisnya yakni sebagai negara lintas benua

Kemudian ada identitas tipe, identitas ini lebih menitikberatkan pada aspek non-fisik, identitas ini dapat berubah namun relatif sulit karena mengakar kuat pada masyarakat suatu negara, yang termasuk identitas tipe adalah ideologi suatu negara, sejarah, keyakinan dll. Lalu ada identitas peran, identitas ini cenderung gampang berubah-ubah tergantung situasi sosial para aktor, karena untuk mendapatkan identitas ini butuh pengakuan aktor lain dalam hal ini harus terjadi interaksi sosial diantara para aktor

dan tidak dapat diakui secara sepihak. Sebagai contoh ada identitas kolektif, sederhananya adalah kesamaan identitas yang melekat oleh 2 atau lebih aktor, identitas kolektif biasanya muncul karena ada persamaan tersentu seperti, kesamaan budaya, kesamaan sejarah, kesamaan pandangan politik dll. Identitas kolektif bertujuan untuk mengikat 2 negara atau lebih agar tindakan/kebijakan yang dikeluarkan pun cenderung sama berdasarkan identitas yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh identitas kolektif adalah identitas Turki bersama negara-negara barat dengan keanggotaan NATO.

B. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri secara sederhana berbeda dengan politik luar negeri atau yang sering kita sebut *foreign policy*. George modelski mendefinisikan politik luar negeri sebagai suatu sistem atau segala kegiatan suatu negara untuk mengubah aktivitas dan perilaku negara lain dan juga sebagai upaya penyesuaian aktivitas negara itu sendiri dalam situasi global (Bakry, 2017). Sedangkan kebijakan luar negeri merupakan representasi dari kebijakan domestik negara dan juga sebagai upaya negara dalam mempertahankan eksistensinya dalam politik internasional. Dalam situasi global, kebijakan luar negeri menjadi instrument sebuah aktor negara dalam memenuhi hal yang dibutuhkan dalam negara itu sendiri atau dalam hal ini kita sebut sebagai kebutuhan domestik. Menurut K.J Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang

dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan (Holsti, 1983). Sedangkan menurut Rosenau, tujuan dari kebijakan luar negeri adalah fungsi dari negara itu sendiri dibentuk. Tujuan tersebut bersumber dari hal yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi masyarakat untuk masa yang akan datang (Rosenau., 1969).

Namun KJ. Holsti sendiri membagi tujuan bernegara yang dimaksud menjadi 3 aspek utama yaitu :

- Nilai, yang diletakkan pada tujuan negara, sebagai faktor utama dalam pembuatan kebijakan.
- Waktu, atau dalam hal ini deadline dalam mencapai tujuan yang dimaksud
- Jenis tuntutan tujuan, negara tujuan akan dibebankan dari negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Perbedaan pendapat antara KJ.Holsti dan Rosenau dalam mendefinisikan tujuan bernegara yang menjadi pijakan awal dalam pembentukan kebijakan luar negeri terletak pada tujuan prioritas, dimana menurut Holsti tujuan dominan dalam negara terletak pada tujuan jangka panjang dalam hal ini rencana, cita-cita serta ideologi negara dalam sistem internasional, sedangkan tujuan jangka panjang menurut Rosenau lebih kepada aspek perdamaian, kekuasaan dan keamanan.

Maka dari itu jika dianalogikan, politik luar negeri memiliki jangkauan atau ruang lingkup yang lebih luas didalam suatu negara atau bisa disebut juga sebagai aspek makro dalam suatu negara sedangkan

kebijakan luar negeri lebih bersifat mikro karena kebijakan luar negeri itu sendiri merupakan hasil dari politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara.

Kebijakan luar negeri memiliki beberapa banyak komponen, beberapa diantaranya adalah pandangan, sikap bahkan tindakan yang memiliki implikasi langsung terhadap sistem internasional. Tindakan dalam hal ini dapat disebut juga sebagai kebijakan yang merupakan pencerminan kapabilitas atau power dalam suatu negara dalam pandangan kaum realis. Selain itu beberapa komponen juga sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah relevansi sumber daya terhadap situasi diplomatic dimana kuantitas sumber daya suatu negara baik itu berupa sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), bahkan sumber daya militer turut mempengaruhi adanya kebijakan luar negeri karena sumber daya tersebut tentu saja menjadi instrument negara dalam mendefinisikan apa yang menjadi kepentingannya yang akhirnya terwujud dalam bentuk perumusan kebijakan luar negeri

Komponen lain yang turut mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah adanya ketergantungan diantara 2 negara atau lebih, umumnya suatu negara akan rentan dipengerui oleh kebijakan luar negeri negara lain jika dalam suatu hubungan negara tersebut “bergantung” hal ini tentu saja. Namun dalam situasi global yang bersifat dinamis tentu saja suatu negara akan membutuhkan negara lain dalam bidang apapun itu bahkan negara adikuasa sendiri namun dengan kuantitas yang lebih minim. Hal

tersebutlah yang menjadikan dinamika implementasi antar negara satu dengan yang lainnya cukup kompleks.

Secara tradisional berbicara mengenai kebijakan luar negeri pasti tidak akan terlepas dari konsep *world of states* atau dunia negara dengan aktor utamanya adalah negara. Hal tersebut tidak jauh beda dengan isu-isu hubungan internasional yang lain dengan menjadikan aktor state sebagai aktor utama atau disebut juga sebagai *state-centris* karena perspektif tersebut cenderung mengagungkan aspek “power” sehingga menghasilkan perbedaan kebijakan luar negeri negara berdasarkan tingkat powernya yang dikenal seperti “Great powers”, “Middle powers”, dan “Small powers” (Hutabarat, 2005). Namun seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan kumunculan aktor-aktor non-state, perspektif mengenai kebijakan luar negeri yang cenderung ke arah state-centris mulai berubah yang juga turut mempengaruhi isu, komponen dan aktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri.

Kondisi demikian akhirnya menghasilkan proses perumusan kebijakan luar negeri yang cukup kompleks dimana sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam suatu negara walaupun begitu proses keputusan tetap dibuat oleh para pemangku kepentingan yang kemudian disebut para elite politik suatu negara.

Dalam melihat model kebijakan luar negeri suatu negara maka kita dapat melihat dari 3 level analisis berbeda yaitu kebijakan luar negeri yang dianalisis dari level individu (pemimpin negara), kebijakan luar negeri yang

dianalisis melalui level domestik negara, dan kebijakan luar negeri yang dianalisis dari level sistem.

Jika dihubungkan dengan konsep konstruktivisme yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konstruktivisme melihat bahwa realitas internasional tidak bersifat *given* melainkan dikonstruksi secara sosial melalui interaksi para aktor. Jadi kebijakan luar negeri dalam pandangan konstruktivisme murni karena adanya faktor non-material yang akhirnya menjadikan aktor negara dapat mendefinisikan kepentingannya atas negara lain atau dalam situasi internasional secara global sekalipun, dan hal tersebut secara langsung juga merujuk pada konstruktivisme berbasis identitas.

Menurut Viotti dan Kauppi, identitas muncul dari pertanyaan dasar mengenai eksistensi diri, hal tersebut merujuk pada pertanyaan mengenai siapa saya dan kamu serta apa yang yang menjadi pembeda diantara kita (Andriasanti, 2014). Identitas-lah yang mendasari adanya kepentingan suatu negara dan bermuara pada apa yang kita sebut dalam hal ini sebagai kebijakan luar negeri. Namun bukan berarti kepentingan nasional yang menjadi salah satu pemicu dari terbentuknya kebijakan luar negeri suatu negara tidak mewakili elemen material seperti dalam padangan kaum realis, namun elemen material yang mempengaruhi proses terbentuknya kebijakan luar negeri hanya dapat bernilai dan menjadi faktor krusial jika negara mendefinisikan hal demikian.

Studi mengenai identitas dalam mengkaji kebijakan luar negeri pun bukanlah hal yang baru, melainkan telah ada beberapa akademisi mengkaji permasalahan tersebut salah satunya adalah Husamettin Inac dan Ahmad Sadeghi (Andriasanti, 2014), mereka menguraikan fenomena perubahan identitas Turki yang terjadi dalam periode yang cukup panjang, semuanya terangkum dalam karyanya yang berjudul “Identity Problems of Turkey during the European Union Integration Process”. Dalam karya itu dijelaskan bahwa identitas Turki mengalami periode modernisasi yang cukup panjang mulai dari zaman Ottoman, revolusi kaum kemalis, hingga integrasi dengan Uni Eropa yang kesemua zaman tersebut juga turut memberikan sumbangsi pada perkembangan dan perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi di negara lintas benua tersebut.

C. Analisis Idiosinkratik dalam Hubungan Internasional

Dalam studi hubungan internasional, pendekatan idiosinkratik menekankan pentingnya karakteristik unik individu—terutama pemimpin negara—dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Pendekatan ini berada dalam kerangka level analisis individu dan berperan menjelaskan variasi perilaku luar negeri negara-negara yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh teori-teori sistemik seperti realisme atau liberalisme (Navaro Parkin, 2023).

Istilah “idiosinkratik” mengacu pada karakter atau ciri khas unik yang melekat pada individu tertentu. Dalam konteks hubungan internasional, istilah ini digunakan untuk merujuk pada pandangan dunia, persepsi, dan disposisi pemimpin yang membentuk keputusan politik mereka (Annisa Shalsabila, 2023). Konsep ini kerap dipadankan dengan "persepsi elit", karena menitikberatkan pada bagaimana pemimpin memahami dan merespons lingkungannya.

Level analisis individu dipandang sebagai fondasi dari struktur sistem internasional, karena perilaku negara dan pola interaksi global berakar pada tindakan dan pilihan individu. Kenneth Waltz menyebutnya sebagai *First Image*, yaitu level analisis yang mengkaji bagaimana sifat manusia dan perilaku individu berkontribusi terhadap konflik dan perdamaian internasional (Waltz, 1959).

Pendekatan ini mulai mendapatkan pengakuan luas pasca-Perang Dunia II, ketika banyak ilmuwan politik mempertanyakan asumsi rasionalitas mutlak dalam pengambilan keputusan luar negeri. Perkembangannya meningkat selama era Perang Dingin seiring meningkatnya kebutuhan untuk memahami motivasi para pemimpin negara adidaya (Cottam et al., 2010).

Secara metodologis, analisis idiosinkratik biasanya dilakukan melalui *psychobiography*—yang mengevaluasi latar belakang pribadi pemimpin, dan *content analysis*—yang mengkaji pernyataan-pernyataan

publik mereka. Metode *Leadership Trait Analysis* (LTA) yang dikembangkan oleh Margaret Hermann juga banyak digunakan. Hermann mengidentifikasi tujuh ciri kepribadian penting, termasuk kepercayaan diri, kebutuhan akan kekuasaan, hingga kompleksitas konseptual, yang mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang (Hermann, 2003).

Selain LTA, pendekatan *Operational Code Analysis* juga digunakan untuk memahami sistem keyakinan seorang pemimpin, baik yang bersifat filosofis (tentang bagaimana dunia bekerja) maupun instrumental (tentang cara bertindak dalam dunia politik) (Walker et al., 2003).

Ada beberapa faktor utama yang membentuk karakteristik idiosinkratik pemimpin, yakni:

1. **Faktor Psikologis:** mencakup keterbatasan kognitif, kondisi emosional, dan bias-bias psikologis umum yang membentuk cara berpikir dan bertindak seorang pemimpin dalam situasi krisis (Hudson, 2005).
2. **Kepribadian dan Gaya Kepemimpinan:** menjadi lebih dominan dalam konteks sistem politik otoriter, situasi krisis, dan dalam kebijakan luar negeri yang bersifat personal.
3. **Latar Belakang dan Pengalaman Hidup:** termasuk keluarga, pendidikan, dan pengalaman masa lalu yang dapat membentuk visi politik seorang pemimpin.

Pendekatan ini unggul dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan secara mendalam dan personal, serta dapat memprediksi perilaku pemimpin di masa depan. Namun, pendekatan ini juga menghadapi tantangan besar dalam hal objektivitas, generalisasi, dan bias Eropa-sentris dalam metodologinya (Mintz & DeRouen, 2010).

Analisis idiosinkratik terus berevolusi dengan pendekatan seperti *Psychocultural International Relations (PCIR)* yang menggabungkan aspek budaya dan psikologi, serta pemanfaatan teknologi seperti *natural language processing* untuk mengidentifikasi pola dalam narasi politik pemimpin. Selain itu, fokus kini meluas ke aktor non-negara seperti korporasi global atau organisasi teroris, mencerminkan kompleksitas lanskap global saat ini (Salvatore, 2024).**n**

Analisis idiosinkratik menawarkan perspektif unik dalam memahami kebijakan luar negeri, terutama dalam konteks krisis dan ketidakpastian. Dengan memusatkan perhatian pada pemimpin sebagai aktor utama, pendekatan ini membantu menjelaskan dinamika internal dari keputusan yang memengaruhi politik internasional secara luas. Dalam dunia yang semakin kompleks, pendekatan ini menjadi alat yang semakin penting bagi pengkaji hubungan internasional.